

# Militerisasi Agrikultur: Keterlibatan Militer Dalam Program Food Estate Indonesia 2020-2024

## The Militarization of Agriculture: Military Involvement in Indonesia's Food Estate Program (2020–2024)

Wildan Faisol<sup>1</sup>, Heri Herdiawanto<sup>1</sup>, Ashabriel Nadiva Candialmeera<sup>1</sup>, Nobel Jihadine<sup>1</sup>,

<sup>1</sup>Universitas Al-Azhar Indonesia

Komplek Masjid Agung Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110

<sup>2</sup>Griffith University Brisbane, Australia

Corresponding Author: [wildan.faisol@uai.ac.id](mailto:wildan.faisol@uai.ac.id)

|                            |                           |                            |                             |
|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Received:<br>Dec. 01, 2025 | Revised:<br>Dec. 24, 2025 | Accepted: Dec. 26,<br>2025 | Published:<br>Dec. 31, 2025 |
|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|

**Abstract :** *The COVID-19 pandemic triggered global food security threats, prompting the Indonesian government to launch the Food Estate as a National Strategic Project. A defining feature of this policy is the active involvement of the military, with the Ministry of Defence appointed as the leading sector. This study analyzes the factors and implications of military involvement in food governance (2020–2024) through Donald Travis's Pragmatic Civil Control theory. Findings indicate that the government utilized the pandemic as a "political opportunity" to prioritize military command efficiency over civilian bureaucratic processes. While this pragmatic approach seeks rapid results, it reflects "food securitization" that bypasses traditional democratic checks. Evidence shows a significant disconnect between these efficiency goals and reality: the marginalization of Dayak indigenous rights in Central Kalimantan, a lack of public participation, and a shift toward centralized, hierarchical governance. Ultimately, the normalization of the military's role in civilian spheres risks deepening democratic regression. This study concludes that such pragmatism may revive "dual function" (dwifungsi) patterns, threatening civilian supremacy and the sustainability of Indonesia's post-Reformasi democratic values.*

**Keywords :** Food, Indonesia, Military, Pandemic, Pragmatic

**Abstrak :** *Pandemi COVID-19 memicu ancaman ketahanan pangan global yang merespon pemerintah Indonesia dengan meluncurkan Food Estate sebagai Proyek Strategis Nasional. Fitur utama kebijakan ini adalah keterlibatan aktif militer, dengan penunjukan Kementerian Pertahanan sebagai sektor utama. Penelitian ini menganalisis faktor dan implikasi keterlibatan militer dalam tata kelola pangan (2020–2024) melalui teori Kontrol Sipil Pragmatis Donald Travis. Temuan menunjukkan bahwa pemerintah memanfaatkan pandemi sebagai peluang politik*

*untuk memprioritaskan efisiensi komando militer guna melewati hambatan birokrasi sipil. Meskipun pendekatan pragmatis ini bertujuan untuk hasil cepat, hal ini mencerminkan sekuritisasi pangan yang mengabaikan mekanisme pengawasan demokratis. Fakta di lapangan menunjukkan diskoneksi antara tujuan efisiensi dengan realitas: marginalisasi hak masyarakat adat Dayak di Kalimantan Tengah, kurangnya partisipasi publik, dan pergeseran menuju tata kelola hierarkis yang terpusat. Pada akhirnya, normalisasi peran militer dalam ranah sipil berisiko memperdalam regresi demokrasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pragmatisme tersebut berpotensi menghidupkan kembali pola serupa dwifungsi militer, yang mengancam supremasi sipil dan keberlanjutan nilai-nilai demokrasi pasca-Reformasi di Indonesia.*

**Kata kunci :** Indonesia, Militer, Pangan, Pandemi, Pragmatis

## PENDAHULUAN

Isu keamanan dalam studi hubungan internasional berkembang dengan memunculkan definisi baru yaitu keamanan non-tradisional. Menjelang akhir dekade 1990-an, sekelompok pemikir studi hubungan internasional dari Copenhagen University bernama *The Copenhagen School of Security Studies* memperluas objek cakupan isu keamanan dengan menggeser dominasi diskursus keamanan negara menjadi keamanan manusia (*Human Security*).<sup>1</sup> Keamanan non tradisional berfokus beberapa isu diantaranya keamanan ekonomi, keamanan lingkungan, keamanan pangan, keamanan energi dan masalah-masalah sosial lainnya. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengadopsi pemikiran tersebut melalui UN Development Programme dalam laporan “*Human Development Report*” tahun 1994.<sup>2</sup>

Laporan tersebut memuat beberapa poin. *Pertama*, keamanan ekonomi yang menitikberatkan pada kemiskinan, pengangguran dan krisis ekonomi. *Kedua*, keamanan pangan dengan memfokuskan pada ancaman-ancaman yang dapat berdampak mengganggu akses terhadap pangan. *Ketiga*, keamanan lingkungan terkait sisi negatif dari berbagai kasus degradasi lingkungan. *Keempat*, keamanan politik yakni kepastian setiap individu manusia dapat memiliki hak-hak dasarnya tanpa dipengaruhi oleh tekanan politik di sekitarnya. *Kelima*, keamanan kesehatan yaitu tuntutan untuk dijaminnya akses terhadap fasilitas kesehatan baik dalam bentuk infrastruktur rumah sakit atau ketersediaan peralatan medis lainnya.

Dalam aspek keamanan pangan, merujuk dari laporan World Food Programme tahun 2021 memberikan hasil analisisnya bahwa pada tahun 2020 seiring dengan munculnya pandemi Covid-19 terdapat hampir 800 juta jiwa masyarakat dunia yang mengalami ancaman kelaparan kronis.<sup>3</sup> Jumlah ini meningkat cukup tinggi dari tahun 2019 yang berjumlah 650 juta jiwa. Badan PBB yang memiliki fokus di isu pangan yaitu Food Agriculture Organization (FAO) juga menyatakan bahwa pandemi Covid-19 mengakibatkan krisis pangan yang kemudian mendorong seluruh negara-negara untuk menata ulang kembali strategi ketahanan pangan nasionalnya.<sup>4</sup>

Berbagai krisis yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 salah satunya ancaman krisis pangan mengancam ketahanan pangan Indonesia. Pada tahun 2020, pemerintahan Indonesia

---

<sup>1</sup> Paul D. Williams and Matt McDonald, *Security Studies An Introduction*, 4th ed., ed. Paul D. Williams and Matt McDonald (Routledge, 2023).

<sup>2</sup> Abubakar Eby Hara, Agus Trihartono, and Suyani Indriastuti, *Keamanan Insani (Human Security): Eksplorasi Berbagai Perspektif Di Dunia* (Bantul: Pandiva, 2023).

<sup>3</sup> Akbar Akbar et al., “COVID-19 Pandemic and Food Security: Strategic Agricultural Budget Allocation in Indonesia,” *Journal of Agriculture and Food Research* 18 (December 2024), <https://doi.org/10.1016/j.jafr.2024.101494>.

<sup>4</sup> Akbar et al.

meluncurkan program food estate sebagai proyek pengembangan lumbung pangan nasional karena ketahanan pangan sebagai bagian dari pertahanan nasional.<sup>5</sup> Pengembangan lumbung pangan nasional melalui program food estate dibagi menjadi dua skema yaitu militer dan non militer. Untuk skema militer berasal dari pembentukan Badan Cadangan Logistik Strategis Nasional (BCLSN) dan dikelola oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan). BCLSN dijalankan dengan menggunakan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan tenaga komponen cadangan (Komcad).<sup>6</sup>

Keterlibatan militer dalam bentuk penunjukkan Kemhan untuk menjalankan program food estate justru tidak sejalan dengan nilai-nilai reformasi TNI pasca reformasi yaitu salah satunya adalah penghapusan Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Dalam penelitian ini penulis bertujuan ingin menjelaskan faktor-faktor yang melatar belakangi pemerintahan Indonesia melibatkan kelompok militer dalam tata kelola ketahanan pangan Indonesia melalui program Food Estate tahun 2020-2024.

Keterlibatan pihak militer dalam tata kelola ketahanan pangan nasional memberikan jalan bagi pihak militer untuk kembali terlibat dalam urusan sipil sehingga dapat mengancam keberlangsungan nilai-nilai demokrasi. Penelitian ini penting untuk ditelaah lebih dalam untuk menempatkan posisi militer Indonesia sebagai kelompok yang mengambil peran dalam tata kelola pangan nasional sehingga memberikan peluang untuk semakin mundurnya aspek nilai-nilai demokrasi yang telah digagas dan dijalankan pasca reformasi tahun 1998.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang melandasi sikap pemerintah Indonesia melibatkan militer dalam program lumbung pangan nasional (*Food Estate*) tahun 2020 sampai dengan 2024. Jika dirumuskan fokus penelitian ini dalam bentuk kalimat pertanyaan maka akan berfokus terkait “Mengapa pemerintah Indonesia menunjuk Kemhan sebagai representasi pihak militer dalam tata kelola lumbung pangan Indonesia tahun 2020-2024?”.

*State of the art* yang peneliti tawarkan dalam penelitian ini terletak pada pendekatan teoritis Kontrol Sipil Pragmatis untuk membedah fenomena militerisasi pangan pasca-pandemi, melampaui kritik normatif regresi demokrasi yang ada. Adapun *novelty* (kebaharuan) yang peneliti tawarkan adalah pembuktian adanya deviasi struktural dalam hubungan sipil-militer di Indonesia, di mana logika pertahanan mengkooptasi sektor agrikultur melalui institusi BCLSN. Penelitian ini secara orisinal membedah kegagalan prinsip partisipatif dan provisional dalam *Food Estate* yang justru mereplikasi pola kegagalan masa lalu demi stabilitas sirkulasi elit politik.

## KAJIAN TEORITIS

Pada kajian teoritis ini peneliti menggunakan tiga penelitian sebelumnya yang menjadi rujukan yang dapat menjadi dasar keberlanjutan atas topik penelitian yang disusun. Penelitian pertama dari Setijadi berargumen bahwa pandemi memberikan kesempatan bagi era Pemerintahan Jokowi untuk memaksimalkan reformasi politiknya yang telah direncanakan sebelumnya.<sup>7</sup> Diantaranya ialah perluasan wewenang lembaga Badan Intelijen Negara (BIN) diluar fungsi utamanya. BIN diberikan wewenang untuk terlibat dalam pelaksanaan vaksinasi, disinfeksi area hingga diberikan justifikasi untuk melahirkan unit khusus terkait “intelijen medis”.

<sup>5</sup> Beni Rudiawan et al., “Building an Integrated Food Estate to Realize Territorial Resilience in Papua,” *Open Access Indonesia Journal of Social Sciences* 4, no. 2 (June 2021): 360–69, <https://doi.org/10.37275/oaijs.v4i2.60>.

<sup>6</sup> Pusaka, *FOOD ESTATE PAPUA, Mengancam Kualitas Hidup Rakyat Papua Dan Lingkungan Hidup* (Papua, 2021).

<sup>7</sup> Charlotte Setijadi, “The Pandemic as Political Opportunity: Jokowi’s Indonesia in the Time of Covid-19,” *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 57, no. 3 (2021): 297–320, <https://doi.org/10.1080/00074918.2021.2004342>.

Hal itu terjadi karena pemerintah Indonesia menggunakan sudut pandangan dengan analogi situasi perang dalam menghadapi ancaman pandemi virus Covid-19. Oleh karena itu disertai dengan berbagai langkah yang melegitimasi mobilisasi personel militer dan intelijen hingga ke lapisan masyarakat akar rumput. Selain itu pemerintah juga semakin intensif mengintervensi kebebasan berekspresi di dunia maya. Intervensi ini diperlihatkan dengan peningkatan patroli siber melalui aparat kepolisian untuk memantau kritik masyarakat di media sosial dengan menggunakan UU ITE.

Penelitian kedua dari Jati berasumsi bahwa pandemi Covid-19 memberikan dampak besar terhadap sistem demokrasi di Indonesia.<sup>8</sup> Hal ini terjadi karena pengkerdilan ruang untuk kebebasan berpendapat oleh negara dengan mengatasnamakannya sebagai kebijakan negara untuk pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19. Dalam momen pandemi ini menjadi katalis bagi pemerintah untuk bertindak lebih sentralistik sehingga mekanisme *check and balances* tidak berfungsi maksimal dan optimal.

Seperti ketika pengesahan UU Omnibus Law (UU Cipta Kerja) dilakukan tanpa mekanisme pelibatan aspirasi publik yang memadai karena memanfaatkan situasi pandemi dan pembatasan sosial. Hal ini semakin problematik juga dengan eskalasi peningkatan jumlah personel militer yang mengisi posisi jabatan sipil aktif selama periode penanganan pandemi virus Covid-19. Jadi dalam kesimpulannya, menemukan tiga dampak negatif utama dari pandemi Covid-19 terhadap demokrasi Indonesia yakni macetnya demokrasi, menguatnya ketimpangan politik, dan semakin mendalamnya klientelisme. Ketiga dampak tersebut memberikan konsekuensi bahwa pandemi Covid-19 ini menjadi kontribusi positif terhadap elit politik untuk meneruskan agenda politiknya dengan mengatasnamakannya sebagai kebijakan penanggulangan pandemi.

Dalam konteks demokrasi Indonesia, penilaian terhadap kualitas demokrasi mengalami penurunan signifikan. Berdasarkan laporan indeks demokrasi global 2020 yang dirilis oleh the Economist Intelligence Unit pada 2021, skor indeks demokrasi Indonesia menurun dari 6,48 (2019) menuju 6,3 (2020).<sup>9</sup> Beberapa aspek acuan yang dipakai dalam indeks tersebut adalah proses electoral, pluralism, kinerja pemerintah, kebebasan sipil, partisipasi politik dan kultur politik. Penilaian terhadap lima aspek acuan tersebut membuat Indonesia termasuk dalam kategori *flawed democracy* atau cacat demokrasi. Skor indeks demokrasi Indonesia termasuk yang terendah dalam 14 tahun terakhir dan bahkan dalam indeks tersebut Indonesia dibawah Malaysia, Filipina dan Timor Leste.<sup>10</sup>

Era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) nampak dengan jelas bentuk pelibatan kelompok-kelompok militer untuk menangani berbagai urusan publik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai ranah urusan publik seperti pangan, pertanian, kesehatan, dan penanggulangan bencana alam. Penugasan militer dalam berbagai urusan sipil ini kontradiktif dengan prinsip netralitas militer yang bermula dari penghapusan Dwifungsi ABRI pasca reformasi tahun 1998. Momen pandemi Covid-19 justru dimanfaatkan oleh pemerintahan Jokowi untuk melakukan konsolidasi kekuatan politik sehingga praktik-praktik otoritarianisme yang mengancam demokrasi justru semakin bermunculan di era pandemi Covid-19.

---

<sup>8</sup> Wasisto Raharjo Jati, "The Impact of Ongoing Pandemic COVID-19 on Indonesia Democracy: Democratic Breakdown, Political Inequality, and Deepening Clientilism," *Jurnal Penelitian Politik*, 19, no. 1 (June 2022).

<sup>9</sup> Damar Kristal, "PERBANDINGAN (DE)KONSOLIDASI DEMOKRASI: STUDI PENURUNAN KUALITAS DEMOKRASI DI INDONESIA DAN FILIPINA PADA PERIODE 2016-2020," *Jurnal Penelitian Politik* 18, no. 2 (November 2021): 122–40.

<sup>10</sup> Freedom House, "Indonesia : Freedom in the World 2023 Marking 50 Years in the Struggle for Democracy," *Freedom In The World* 2023, March 2023, <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2023>.

Penelitian ketiga dari Wisnu menekankan bahwa program besar *food estate* berlandung dibalik justifikasi “Pemulihan Ekonomi Nasional” (PEN).<sup>11</sup> Dalam program *food estate* ini melibatkan militer secara massif dalam operasional lapangan melalui koordinasi Bintara Pembina Desa (BABINSA). BABINSA turut terlibat dalam penyiapan dan pembersihan lahan yang akan menjadi sentra *food estate*. Dalam prosesnya, pembukaan lahan hutan untuk *food estate* seringkali bermasalah secara hukum dan melanggar Hak Asasi Manusia, karena dilakukan tanpa partisipasi Masyarakat suku adat setempat. Khususnya masyarakat suku Dayak yang terdampak dari program *food estate* di Kalimantan Tengah kehilangan akses mereka terhadap hutan sebagai sumber penghidupan dan pemenuhan kebutuhan medis seperti bahan obat-obatan tradisional. Program ini menyebabkan konflik vertikal serta meningkatkan risiko krisis ekologis karena mengabaikan aspek sosial dan lingkungan.

Berdasarkan ketiga penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pembahasan akan ketahanan demokrasi dan hubungan sipil militer Indonesia dalam program pengembangan lumbung pangan nasional, peneliti memfokuskan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang melandasi sikap pemerintah Indonesia melibatkan militer dalam program lumbung pangan nasional (*Food Estate*) tahun 2020 sampai dengan 2024. Ketiga artikel dalam kajian pustaka memberikan fondasi kritis mengenai regresi demokrasi. Penulis menawarkan pendekatan teoritis menggunakan Kontrol Sipil Pragmatis dari Donald Travis sebagai pilihan ideal karena mampu membedah aspek provisional yang gagal dipenuhi pemerintah. Setijadi dan Jati menyoroti bagaimana pandemi menjadi alat legitimasi untuk memperluas peran militer guna mencapai efisiensi komando di tengah krisis. Sementara itu, Wisnu membuktikan bahwa di tingkat lapangan, efisiensi ini justru berujung pada marginalisasi hak masyarakat adat setempat dan kerusakan ekologis secara masif.

Justifikasi teori Travis menjadi semakin krusial ketika membandingkan proyek *Food Estate* saat ini dengan kegagalan historis seperti *Mega Rice Project* dan MIFEE. Dalam kerangka Travis, kebijakan yang pragmatis seharusnya bersifat empiris dan terbuka pada evaluasi. Namun, pemerintah justru menunjukkan sikap kaku dengan mereplikasi pola kegagalan masa lalu yang telah terbukti menimbulkan penderitaan sosial dan kerusakan lingkungan. Tanpa adanya refleksi atas kesalahan sejarah ini, keterlibatan militer melalui Kementerian Pertahanan bukan lagi langkah praktis untuk mengatasi krisis, melainkan sebuah deviasi struktural yang mengabaikan legitimasi sosial demi dominasi politik-ekonomi pusat. Pendekatan teoritis dari Travis memungkinkan penelitian ini membuktikan bahwa pragmatisme yang dijalankan saat ini adalah bentuk absolutisme kebijakan yang mengikis nilai-nilai demokrasi pasca-Reformasi.

Secara konsep kedaulatan Pangan yang menekankan hak masyarakat untuk menentukan sistem pangan secara mandiri. Keterlibatan militer dalam *Food Estate* justru mencerminkan Sekuritisasi Pangan, di mana pangan dikelola dengan logika pertahanan yang terpusat dan hierarkis. Hal ini menciptakan kontradiksi berupa pemerintah mengejar pendisiplinan pola produksi melalui komando militer, namun mengabaikan kearifan lokal seperti sistem pangan sagu di wilayah Papua. Akibatnya, alih-alih mencapai ketahanan, kebijakan ini memicu militerisasi agrikultur yang mengabaikan partisipasi publik dan hak ulayat masyarakat adat setempat.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain eksplanatif untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai hubungan kausalitas dan motivasi di balik kebijakan negara. Sebagaimana dikemukakan oleh McNabb, jenis penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan "mengapa" dan "bagaimana" suatu fenomena terjadi dalam konteks ini, mengapa militer dilibatkan

<sup>11</sup> Ditta Wisnu, “Food Estate Program Law Politics,” *Journal of Contemporary Sociological Issues* 2, no. 1 (2022): 76, <https://doi.org/10.19184/csi.v2i1.28051>.

secara masif dalam urusan ketahanan pangan yang bersifat sipil.<sup>12</sup> Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) yang komprehensif. Peneliti menelaah berbagai literatur sekunder seperti Jurnal ilmiah, buku referensi dan artikel opini dari media nasional. Data yang terkumpul kemudian disintesis menggunakan teknik analisis kualitatif untuk membangun argumentasi logis mengenai penerapan kontrol sipil pragmatis. Melalui metode ini, peneliti dapat membedah bagaimana pandemi COVID-19 dimanfaatkan sebagai peluang secara politik untuk menjustifikasi keterlibatan aktor keamanan (militer) dalam domain sipil.

Operasionalisasi teori kontrol sipil pragmatis dari Donald Travis dilakukan dengan mengukur empat indikator utama: aspek praktis melalui efektivitas hasil kebijakan, pluralistik lewat kolaborasi antaraktor, partisipatif melalui keterlibatan masyarakat adat, dan provisional berdasarkan keterbukaan terhadap evaluasi proyek masa lalu. Validitas kualitatif diperkuat melalui teknik triangulasi sumber yang mengomparasikan regulasi pemerintah dengan laporan investigative dan *field research* dari organisasi-organisasi sipil seperti WALHI dan PUSAKA guna mendeteksi penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang oleh militer Indonesia.

### **Kontrol Sipil Pragmatis**

State of the art dalam penelitian ini dengan penulis menggunakan pendekatan teori kontrol sipil pragmatis dari Travis.<sup>13</sup> Secara garis besar teori kontrol sipil pragmatis berangkat dari penolakannya terhadap argumen Huntington tentang kontrol sipil objektif.<sup>14</sup> Teori kontrol sipil objektif berargumen bahwa militer sebagai suatu organisasi harus menjadi lebih independen dan profesional sehingga kemudian dapat menjauhi segala aktivitas di ranah politik. Selain itu militer diharapkan tidak memiliki spesialisasi tertentu yang tidak memiliki keterkaitan dengan dunia militer, seperti kemampuan mengelola peternakan, pertanian, perkebunan dan lain lain.

Sedangkan dalam kontrol sipil pragmatis perubahan sosial yang terjadi di masyarakat memaksa berbagai elemen termasuk militer untuk bersikap pragmatis dalam beradaptasi dengan perubahan tersebut. Menurut Sukmawan dan Pedrason bentuk praktik kontrol sipil pragmatis di masa pemerintahan Joko Widodo terlihat dari 3 fenomena, yaitu: intervensi purnawirawan TNI/Polri dalam politik praktis, jabatan-jabatan publik dipimpin oleh purnawirawan TNI/Polri, dan semakin banyaknya tata kelola urusan sipil yang diserahkan kepada militer untuk dikendalikan seperti pada proyek *food estate* dan Satuan Tugas penanganan Covid-19. Kemudian terdapat hipotesis kedua yaitu hipotesis domestik yang melingkupi factor-faktor rezim politik, kualitas akan hubungan sipil dan militer serta pengaruh komunitas epistemik.<sup>15</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Ketahanan Pangan Indonesia**

Menurut laporan The SMERU Research Institute, Indonesia berhasil meningkatkan produksi untuk beberapa komoditas pangan sejak tahun 2013 hingga 2019.<sup>16</sup> Produksi Jagung misalnya,

---

<sup>12</sup> David E. McNabb, *Research Methods for Political Science Quantitative, Qualitative and Mixed Method Approaches* (Routledge, 2020).

<sup>13</sup> Donald S. Travis, "Decoding Morris Janowitz: Limited War and Pragmatic Doctrine," *Armed Forces and Society* 46, no. 1 (January 2020): 68–91, <https://doi.org/10.1177/0095327X18760272>.

<sup>14</sup> Donald S Travis, "Saving Samuel Huntington and the Need for Pragmatic Civil–Military Relations," *Armed Forces & Society* 43, no. 3 (2017): 395–414.

<sup>15</sup> Denny Indra Sukmawan and Rodon Pedrason, "Kontrol Sipil Pragmatis: Implementasi Hubungan Sipil-Militer Di Masa Pemerintahan Joko Widodo," *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 13, no. 2 (October 2022): 274–89, <https://doi.org/10.14710/politika.13.2.2022.274-289>.

<sup>16</sup> Sirojuddin Arif et al., *Tinjauan Strategis Ketahanan Pangan Dan Gizi Di Indonesia: Informasi Terkini 2019–2020* (Jakarta, 2020).

meningkat dua kali lipat dari 18,5 juta ton menjadi 33 juta ton per tahun, namun untuk kedelai dan daging sapi cenderung stagnan. Dalam produksi beras memiliki tren khusus yang dapat dikategorikan meningkat dan menurun. Terhitung sejak tahun 2013 hingga 2017, produksi beras meningkat dari 41,43 juta ton menjadi 47,17 juta ton di 2017. Tetapi kemudian menurun pada tahun 2018 dengan angka 33,94 juta ton, bahkan semakin turun pada angka 31,31 juta ton pada tahun 2019.<sup>17</sup>

Mengacu indikator Kementerian Pertanian, negara dapat dikategorikan berhasil dalam swasembada bahan pangan jika tingkat ketergantungan impornya tidak melebihi 10% dari total tingkat konsumsi domestik. Karena besarnya jumlah penduduk Indonesia dan tingginya tingkat ketergantungan masyarakat pada beras sebagai makanan pokok, antara tahun 2013 hingga 2019 Indonesia harus mengimpor rata-rata sekitar 0,9 juta ton gabah setiap tahun dari dunia pasar beras internasional yang cenderung relatif terbatas; dan Indonesia juga turut harus bersaing dengan berbagai negara pengimpor lainnya.

Jika dihadapkan dengan prediksi total populasi hampir mencapai 9 miliar pada tahun 2050 maka permasalahan ketahanan pangan menjadi semakin krusial untuk segera ditemukan solusinya. Umumnya dalam mengatasi problem krisis pangan tersebut terdapat dua aspek fokus utama, yaitu aspek produksi dan aspek perdagangan.

Kapabilitas suatu negara dalam mencapai ketahanan pangannya menjadi penting mengingat tiap negara memiliki kelebihan dan kekurangan pada aspek-aspek seperti tingkat populasi, geografis, sumber daya alam, kualitas pemerintahan dan keterbukaan dalam perdagangan internasional. Indonesia pada era pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam rangka mencapai ketahanan pangannya lebih cenderung memprioritaskan pada impor beras.<sup>18</sup>

### **Food Estate dalam Pendekatan Kontrol Sipil Militer Pragmatis**

Kontrol sipil pragmatis dalam hubungan sipil militer berusaha menjelaskan bahwa terdapat perubahan sosial yang terjadi di tingkat Masyarakat sehingga berimbas kepada kelompok-kelompok seperti kelompok militer untuk mengambil posisi pragmatis. Sikap ini ditujukan supaya dapat beradaptasi dengan segala bentuk perubahan-perubahan sosial di tingkat masyarakat. Menurut Travis, kontrol sipil pragmatis dapat ditinjau dari 4 indikator yaitu praktis, pluralistik, partisipatif dan provisional.

Dalam pendekatan kontrol sipil pragmatik, indikator praktis dalam hubungan sipil dan militer didasarkan oleh adaptasi kelompok militer pada segala bentuk ancaman, krisis atau kebutuhan mendesak yang ada di sekitar masyarakat. Pengabdian dalam bidang militer sudah sepatutnya tidak dibenturkan dengan tujuan publik masyarakat untuk hidup dalam iklim demokratis. Kemudian dalam indikator pluralistik, militer bekerja secara pluralistik didalam sistem politik yang pluralistik.

Indikator tersebut sangat kental dengan nilai-nilai politik Amerika Serikat yang mencoba menampilkan bahwa kelompok militer baik keluarga militer aktif atau kelompok veteran militer di Amerika Serikat tidak memposisikan diri sebagai kelompok politik yang mendekat ke salah satu kelompok partai politik tertentu. Indikator ketiga yaitu partisipatif mendorong militer untuk memiliki keunikan khusus meskipun dituntut dalam berpartisipasi dengan berbagai pihak. Kelompok militer dalam berkoordinasi dan berkolaborasi dengan berbagai lembaga dan organisasi, harus selalu mempetahankan spesialisasinya karena memiliki ketentuan khusus untuk

<sup>17</sup> Arif et al.

<sup>18</sup> John E. McDonnell, "The Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE): An Ecologically Induced Genocide of the Malind Anim," *Journal of Genocide Research* 23, no. 2 (2021): 257–78, <https://doi.org/10.1080/14623528.2020.1799593>.

mempertahankan disiplin militer yang kuat, kompetensi teknis, manajemen persenjataan yang berbeda, dan pengembangan sumber daya manusia yang baik.

Untuk indikator terakhir provisional menjelaskan bahwa hubungan antara sipil dan militer tidak akan bersifat statis melainkan sangat mungkin untuk dapat berubah dengan menyesuaikan terhadap kondisi sosial dan politik yang terjadi. Oleh karena itu, kontrol sipil yang pragmatis membutuhkan pemantauan khusus dan jika dibutuhkan dapat selalu dimodifikasi demi memastikan praktik kontrol sipil-militer tersebut tetap relevan dan efektif

Program *food estate* atau lumbung pangan nasional merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diluncurkan pada masa pandemi Covid-19. Program ini digagas sebagai solusi terhadap ancaman krisis pangan global yang meningkat tajam sejak 2020 akibat gangguan rantai pasok internasional, pembatasan mobilitas, dan fluktuasi harga bahan pokok. Pemerintah Indonesia menganggap ketahanan pangan (*food security*) sebagai bagian integral dari keamanan nasional (*national security*) dan pertahanan negara (*national defence*). Dengan demikian, pangan tidak lagi dipandang sekadar sebagai urusan ekonomi, tetapi sebagai komponen strategis dalam sistem pertahanan nasional total.

Dalam menghadapi persoalan tersebut, pemerintah meluncurkan program Pengembangan Lumbung Pangan Nasional 2020-2024 yang populer disebut *food estate*. Program ini memiliki dua jalur utama pelaksanaan, yakni melalui jalur non-militer dengan memanfaatkan lahan yang disediakan oleh petani, kelompok tani, maupun pihak investor untuk mendukung pembangunan pusat produksi pangan nasional, dan jalur militer dengan lahan yang diperoleh melalui pelepasan kawasan hutan di bawah pengelolaan Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang dipimpin Prabowo Subianto.<sup>19</sup>

Adanya dua jalur ini menjadi polemik karena menandai keterlibatan langsung militer (TNI) dalam sektor pangan, sesuatu yang sebelumnya tidak lazim sejak era reformasi 1998. Pelibatan militer dalam program *food estate* tidak muncul tiba-tiba, melainkan merupakan bagian dari pola “sekuritisasi pangan” yang mulai menguat sejak pandemi. Dalam pandangan pemerintah, ancaman terhadap ketersediaan pangan dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional, sehingga memerlukan respons dengan logika pertahanan. Oleh karena itu, Kementerian Pertahanan ditugaskan untuk menjalankan proyek percontohan (*pilot project*) *food estate* dengan melibatkan TNI aktif dan Komponen Cadangan (Komcad), terutama di wilayah yang dianggap strategis seperti Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Papua.<sup>20</sup>

Secara hukum, dasar pelibatan TNI dijelaskan melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya pasal mengenai Operasi Militer Selain Perang (OMSP).<sup>21</sup> Pasal ini membolehkan TNI terlibat dalam kegiatan non-tempur seperti membantu pembangunan nasional atau menjaga ketahanan pangan. Karena itu, dari sudut pandang pemerintah, tidak ada pelanggaran prinsip sipil-militer, justru ini dianggap implementasi dari doktrin Pertahanan Rakyat Semesta, di mana seluruh komponen bangsa, termasuk militer, boleh dilibatkan dalam menghadapi ancaman non-tradisional seperti krisis pangan.

Pemerintah memandang pangan sebagai komponen logistik strategis pertahanan nasional. Istilah “cadangan strategis nasional” berulang kali digunakan Pemerintahan Jokowi untuk menegaskan bahwa proyek ini bukan hanya produksi pertanian, melainkan upaya membangun sistem pertahanan yang berbasis pada ketersediaan pangan nasional.<sup>22</sup> Logika pemerintah adalah tanpa kedaulatan pangan, tidak akan ada kedaulatan nasional.

<sup>19</sup> Pusaka, *Keterlibatan Militer Dalam Proyek Food Estate: Berpotensi Melanggar HAM* (2021).

<sup>20</sup> Pusaka, *Keterlibatan Militer Dalam Proyek Food Estate: Berpotensi Melanggar HAM* (2021).

<sup>21</sup> Muhamad Haripin, Adhi Priamarizki, and Leonard C Sebastian, *Military Modernisation and Civil-Military Relations in Indonesia* (n.d.).

<sup>22</sup> Pusaka, *FOOD ESTATE PAPUA, Mengancam Kualitas Hidup Rakyat Papua Dan Lingkungan Hidup*.

Secara historis, keterlibatan militer dalam sektor pangan bukanlah hal baru. Dalam sejarahnya, Indonesia pernah menjalankan program Bimas (Bimbingan Massal) dan ABRI Masuk Desa pada era Orde Baru, hingga Upsus Pajale (Upaya Khusus Padi, Jagung, dan Kedelai) pada era Jokowi periode pertama (2015-2019).<sup>23</sup> Yang membedakan program *food estate* 2020-2024 adalah tingkat formalitas dan legitimasi politiknya. Keterlibatan militer kali ini dilembagakan melalui keputusan presiden dan dikelola oleh Kementerian Pertahanan, bukan sekadar dukungan logistik. Ini menandai kembali masuknya militer ke ruang sipil melalui pintu kebijakan pangan. Pelibatan militer dalam *food estate* memperlihatkan dua sisi yang saling bertentangan. Di satu sisi, keterlibatan itu dapat dipahami sebagai upaya realistis dan pragmatis untuk memperkuat kapasitas negara dalam menjamin ketahanan pangan di masa krisis. Di sisi lain, hal itu dianggap menjadi indikator kemunduran demokrasi, karena membuka kembali ruang dominasi militer dalam sektor-sektor sipil. Dengan alasan efisiensi dan stabilitas, pemerintah justru menciptakan preseden berbahaya yang dapat melanggengkan “peran ganda” militer, sesuatu yang seharusnya telah dihapuskan sejak reformasi 1998.

Keterlibatan militer dalam proyek *food estate* diwujudkan melalui pembentukan lembaga baru bernama Badan Cadangan Logistik Strategis Nasional (BCLSN). BCLSN berfungsi sebagai entitas yang mengoordinasikan produksi pangan strategis dan distribusi logistik di bawah payung pertahanan nasional. Selain itu, Kemhan juga menggandeng perusahaan PT. Agro Industri Nasional (Agrinas) yang dimiliki oleh Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan (YPPSDP), yayasan yang berada dalam jaringan kepentingan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan sejumlah purnawirawan TNI (PUSAKA, 2021).

Agrinas bertugas sebagai mitra komersial dalam mengelola, mengolah, dan mendistribusikan hasil proyek *food estate*. Dengan demikian, proyek ini berada di bawah kendali struktural yang mewujudkan sinergi antara institusi pertahanan, militer, dan korporasi. Kemhan menargetkan 1,4 juta hektar lahan pertanian baru, dengan prioritas tanaman singkong, padi, dan jagung yang tersebar di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Papua. Lahan-lahan yang dimanfaatkan sebagian besar diambil dari kawasan hutan negara yang dilepaskan statusnya untuk dijadikan lahan pertanian.<sup>24</sup>

Pelibatan Kemhan dan TNI dalam proyek *food estate* dipandang pemerintah sebagai langkah yang memiliki landasan logis dalam kerangka nasionalisme pembangunan. Pemerintah menggunakan perspektif bahwa kapasitas militer memiliki keunggulan dalam hal kedisiplinan, mobilisasi cepat, dan penguasaan logistik skala besar yang dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan lumbung pangan di berbagai wilayah.<sup>25</sup> Struktur pelaksanaan proyek ini diatur dengan gaya militer. Menteri Pertahanan bertindak sebagai pengarah utama, kepala BCLSN menjadi pelaksana teknis, dan unsur TNI bersama Komcad berperan di tingkat lapangan.<sup>26</sup>

Dalam mekanisme ini, setiap keputusan mengikuti rantai komando, bukan koordinasi horizontal seperti dalam birokrasi sipil. Pendekatan ini dianggap lebih cepat, efisien, dan disiplin dalam mengeksekusi kebijakan strategis negara. Melalui mekanisme tersebut, proyek *food estate* diharapkan mampu menciptakan integrasi antara pembangunan ekonomi nasional dan sistem pertahanan negara secara simultan.

Program *food estate* tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik, tetapi juga sebagai strategi jangka panjang untuk memperkuat kemandirian logistik nasional dan

<sup>23</sup> Anggalih Bayu Muh. Kamim, *Kawula Tani Di Bawah Sepatu Lars: Militer Dalam Program Upsus Pajale Tahun 2015-2017 Di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta*, 1 (2019).

<sup>24</sup> Laksmi Adriani Savitri, Natasha Devanand Dhanwani, and Sutami Amin, “Biopolitik Food Estate Dan Kerusakan Metabolik Alam-Manusia Papua,” *FLAN Indonesia Dan PUSAKA*, 2023, 1–49.

<sup>25</sup> Pusaka, *Keterlibatan Militer Dalam Proyek Food Estate: Berpotensi Melanggar HAM* (2021).

<sup>26</sup> Pusaka, *FOOD ESTATE PAPUA, Mengancam Kualitas Hidup Rakyat Papua Dan Lingkungan Hidup*.

membangun cadangan strategis negara. Pelaksanaan proyek melibatkan unsur-unsur pertahanan negara dalam seluruh rantai kebijakan, mulai dari perencanaan, pengawasan, hingga implementasi lapangan. Model ini memperlihatkan bahwa pemerintah menganggap keberhasilan *food estate* sebagai bagian dari ketahanan nasional yang tak terpisahkan dari konsep keamanan negara secara luas.<sup>27</sup>

Polemik muncul atas pertanyaan mengapa pemerintah sipil justru membuka ruang bagi militer untuk terlibat dalam urusan non-pertahanan. Dalam hal ini, pelibatan TNI tidak selalu dilihat sebagai bentuk ancaman terhadap demokrasi, tetapi sebagai strategi pragmatis pemerintah untuk memanfaatkan kapasitas organisasi militer seperti kedisiplinan, kemampuan logistik, dan jaringan komando guna mencapai tujuan pembangunan secara cepat.

Apabila pendekatan yang digunakan pemerintah dalam proyek *food estate* ini dipahami melalui kerangka teori kontrol sipil pragmatis dari Donald S. Travis, maka dapat dilihat bahwa praktik yang dijalankan pemerintah merupakan manifestasi dari pola hubungan sipil-militer yang bercorak adaptif dan instrumental. Travis yang dalam bukunya mengadopsi pemikiran James W. tentang pragmatisme menjelaskan bahwa pragmatisme dalam kontrol sipil “*turns towards concreteness and adequacy, towards facts, towards action and toward power*,” yaitu suatu pendekatan yang berorientasi pada tindakan konkret dan pemanfaatan sumber daya yang efektif demi tercapainya tujuan nasional.<sup>28</sup>

Dalam konteks ini, keputusan pemerintah untuk melibatkan Kemhan dan TNI secara langsung dapat dipahami sebagai penerapan nilai praktis, karena menempatkan efektivitas dan tindakan nyata di atas pertimbangan sektoral. Pemerintah memanfaatkan kapabilitas militer dalam bidang logistik dan mobilisasi sebagai solusi terhadap keterbatasan kapasitas birokrasi sipil dalam merespons krisis pangan.

Selanjutnya, nilai kedua yang dijelaskan Travis, yaitu pluralistik, juga tampak dalam upaya pemerintah menciptakan integrasi lintas sektor antara pertahanan dan ekonomi. Pemerintah menekankan bahwa program *food estate* tidak hanya dikelola oleh Kemhan dan TNI, tetapi juga melibatkan sektor swasta melalui kerja sama dengan PT. Agrinas, serta melibatkan lembaga penelitian dan pemerintah daerah dalam skema koordinasi nasional.<sup>29</sup> Pola seperti ini menunjukkan adanya kesadaran akan perlunya kerja sama antarsektor untuk menjamin keberhasilan program strategis nasional.

Dalam konsep Travis, pluralisme dalam kontrol sipil pragmatis merupakan kebutuhan fungsional untuk menghadapi kompleksitas situasi modern yang menuntut keterpaduan antara sumber daya sipil dan militer.<sup>30</sup> Implementasi *food estate* mewujudkan gagasan pluralistik dalam arti bahwa kebijakan sipil memanfaatkan kapabilitas pertahanan bukan untuk dominasi militer, melainkan untuk mencapai efisiensi nasional melalui sinergi kelembagaan.

Nilai ketiga dalam konsep Travis, yaitu partisipatif, berkaitan dengan keterlibatan warga negara dalam mendukung dan mengambil bagian dalam program pemerintah. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pelaksanaan *food estate* menggunakan tenaga Komponen Cadangan (Komcad) yang direkrut dari kalangan warga sipil untuk dilatih dalam bidang pertahanan dasar sekaligus diberdayakan dalam kegiatan produksi pangan.

Pemerintah menilai bahwa pembentukan Komcad bukan hanya langkah strategis untuk memperkuat cadangan pertahanan, tetapi juga sarana untuk menanamkan rasa tanggung jawab kolektif warga terhadap ketahanan nasional dalam kerangka *food estate* (PUSAKA, 2021). Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Travis bahwa kontrol sipil pragmatis bersifat

---

<sup>27</sup> Pusaka, *Keterlibatan Militer Dalam Proyek Food Estate: Berpotensi Melanggar HAM* (2021).

<sup>28</sup> Travis, “Decoding Morris Janowitz: Limited War and Pragmatic Doctrine.”

<sup>29</sup> Pusaka, *FOOD ESTATE PAPUA, Mengancam Kualitas Hidup Rakyat Papua Dan Lingkungan Hidup*.

<sup>30</sup> Donald S. Travis, “Discovering the Fault Lines in American Civil–Military Relations,” *Armed Forces and Society* 44, no. 4 (October 2018): 731–47, <https://doi.org/10.1177/0095327X17728351>.

partisipatif, karena mengandaikan adanya peran aktif masyarakat dalam struktur keamanan negara tanpa meniadakan supremasi sipil.<sup>31</sup> Program *food estate* dapat dipahami sebagai upaya untuk memperluas partisipasi warga dalam konteks pembangunan nasional melalui jalur pertahanan yang produktif.

Nilai keempat dari pemikiran Travis yaitu *provisional*, yang juga dapat dilihat dalam kerangka pelaksanaan program ini. Pemerintah menempatkan pelibatan militer dalam *food estate* sebagai bagian dari strategi jangka menengah 2020-2024 yang bersifat situasional, yaitu menjawab kebutuhan khusus selama masa pemulihan ekonomi nasional pasca-pandemi. Artinya, keterlibatan TNI dalam proyek pangan tidak dimaksudkan sebagai pengambilalihan fungsi sipil secara permanen, tetapi sebagai bentuk dukungan sementara yang diharapkan dapat ditransformasikan menjadi model kolaborasi lintas sektor setelah target ketahanan pangan nasional tercapai.

Travis menegaskan bahwa kontrol sipil pragmatis bersifat *provisional*, yaitu memungkinkan adaptasi hubungan sipil-militer sesuai kebutuhan konkret tanpa menghapus otonomi sipil.<sup>32</sup> Melalui perspektif tersebut, pelaksanaan *food estate* dapat dipahami sebagai praktik temporer yang mengedepankan fungsi adaptif militer untuk membantu negara mencapai stabilitas sosial-ekonomi dalam keadaan darurat.

Dari keempat nilai tersebut, terlihat bahwa penerapan program *food estate* pemerintah Jokowi menggambarkan bagaimana kontrol sipil di Indonesia dijalankan dalam kerangka pragmatis yang menekankan efektivitas dan adaptabilitas. Pemerintah menafsirkan hubungan sipil-militer bukan dalam bentuk subordinasi satu terhadap yang lain, melainkan sebagai kolaborasi fungsional demi tujuan strategis negara. Pola kerja lintas sektor yang melibatkan Kemhan, TNI, lembaga swasta, dan unsur sipil melalui Komcad mencerminkan realisasi nilai-nilai yang dijelaskan Travis dalam model kontrol sipil pragmatis.

Dalam pemikiran itu, *food estate* dapat dipahami bukan sebagai bentuk dominasi militer, tetapi sebagai manifestasi dari cara berpikir pragmatis pemerintah dalam memanfaatkan seluruh sumber daya nasional untuk mencapai tujuan ketahanan pangan dan keamanan nasional secara bersamaan. Pendekatan pragmatis semacam ini berisiko mengaburkan batas antara domain sipil dan militer, karena fungsi pertahanan bergeser menjadi fungsi sosial-ekonomi, menjadi dilema yang terus beriringan.

### Implementasi Kontrol Sipil Pragmatis yang Problematis

Berbagai laporan dari lembaga swadaya masyarakat yang mengkritik program *food estate* sebagai wujud ambisi politik pemerintah Joko Widodo. Hal tersebut didasari dari hasil konkret program *food estate* yang tidak sebanding dengan ambisi politiknya. Sejumlah proyek gagal mencapai target produksi, menghadapi masalah irigasi, tumpang tindih lahan, dan minimnya partisipasi petani lokal.<sup>33</sup> Oleh karena itu, *food estate* bukan hanya dipertanyakan efektivitasnya secara ekonomi, tetapi juga tujuan politik di baliknya.

Program ini lebih mencerminkan politik simbolik ketahanan nasional, di mana kehadiran militer menjadi alat legitimasi kekuatan negara di tengah krisis, dibanding sebagai solusi substantif terhadap masalah pangan. Pada akhirnya, *food estate* dipahami bukan hanya sebagai kebijakan pertanian, tetapi sebagai proyek politik dan pertahanan yang menggambarkan arah baru tata kelola sumber daya di Indonesia, ke arah yang semakin terpusat, hierarkis, dan mengandalkan instrumen militer. Berdasarkan hal tersebut, militerisasi pangan dapat juga dipahami sebagai refleksi dari kontrol sipil pragmatis, yakni pemerintah sipil mengizinkan militer berperan demi efisiensi, tetapi

<sup>31</sup> Travis.

<sup>32</sup> Donald S Travis, "Pursuing Civilian Control Over the Military," *Armed Forces & Society* 45, no. 3 (2019): 546–60, <https://doi.org/10.1177/0095327X18781539>.

<sup>33</sup> WALHI, *Tinjauan Lingkungan Hidup 2021 : Negara Gagal Atas Krisis ?* (2021).

secara perlahan mengikis batas sipil-militer dan menggeser logika pembangunan menuju logika pertahanan.

Dengan masuknya militer ke dalam pengelolaan pangan, orientasi kebijakan bergeser dari pemberdayaan petani lokal menjadi mobilisasi sumber daya negara untuk kepentingan geopolitik dan stabilitas nasional, atau dapat disebut militerisasi pangan dijadikan strategi untuk menegakkan kontrol negara atas sumber daya dasar yang vital.<sup>34</sup> Hadirnya kepentingan politik pemerintah Jokowi dalam program *food estate* semakin diyakini bukan hanya karena pengerahan militer sebagai pengelola program, tetapi juga karena terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pemerintah dalam eksekusinya.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Yayasan PUSAKA mengungkapkan adanya konflik agraria, perampasan lahan masyarakat adat, serta kerusakan ekosistem hutan dan gambut di lokasi proyek, terutama di Kalimantan Tengah dan Papua. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pemerintah tersebut dapat berkontribusi pada kegagalan terwujudnya penerapan kontrol sipil pragmatis, meskipun secara struktur telah memenuhi nilai-nilai pemikiran tersebut.

Dalam konsep kontrol sipil pragmatis yang dikembangkan oleh Donald S. Travis hubungan antara sipil dan militer seharusnya dijalankan secara fleksibel, empiris, dan kontekstual. Travis menegaskan bahwa kontrol sipil harus diwujudkan dalam praktik sosial dan kebijakan publik yang mencerminkan penerapan secara utuh nilai-nilai praktis, pluralistik, partisipatif, dan provisional.<sup>35</sup> Keempat nilai ini menjadi pilar pengujian apakah sebuah kebijakan publik terutama yang melibatkan unsur negara dan keamanan mampu mencerminkan keseimbangan antara kekuasaan negara, masyarakat, dan kebutuhan manusiawi di dalamnya.

Tidak sempurnanya kontrol sipil pragmatis oleh pemerintah Jokowi dapat dilihat dalam program *Food Estate* di Papua. Nilai praktis yang dikemukakan Travis gagal diimplementasikan oleh pemerintah. Travis menilai bahwa pendekatan pragmatis harus selalu berorientasi pada hasil nyata dan relevan terhadap konteks sosial yang dihadapi. Faktanya, implementasi Pemerintah Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan Food Estate justru tidak dilandaskan pada realitas kehidupan sosial-ekologis masyarakat Papua.

Covid-19 telah memotivasi pemerintah dalam mengupayakan ketahanan pangan. Sayangnya, pemerintah memaksakan model ketahanan pangan berbasis skema nasional dan korporatif tanpa memperhatikan sistem pangan lokal seperti sagu yang menjadi makanan pokok mayoritas masyarakat adat Papua. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dijalankan bukan hasil dari refleksi empiris dan kebutuhan masyarakat sepenuhnya, melainkan instrumen politik ekonomi yang mengorbankan keberlanjutan sosial dan ekologis.<sup>36</sup> Dari kenyataan tersebut, secara teoretis, nilai *practical* yang menuntut kebijakan berbasis bukti dan manfaat langsung bagi masyarakat tidak dipenuhi oleh pemerintah.

Sementara itu, nilai pluralistik dalam kontrol sipil pragmatis menuntut adanya keterlibatan berbagai aktor baik sipil, militer, akademik, maupun masyarakat dalam proses kebijakan. Pluralisme adalah bentuk kesadaran bahwa realitas sosial tidak bisa diselesaikan oleh satu otoritas tunggal, melainkan melalui kolaborasi multiaktor yang saling melengkapi.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Arsita Wahyu Risnanda, Teguh Soedarto, and Fatchur Rozci, "KETAHANAN PANGAN DI TENGAH KETERGANTUNGAN IMPOR BERAS: ANALISIS TREN DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA," *Forum Agribisnis* 15, no. 2 (September 2025): 346–60, <https://doi.org/10.29244/fagb.15.2.346-360>.

<sup>35</sup> Travis, "Pursuing Civilian Control Over the Military."

<sup>36</sup> Walhi Kalimantan Tengah, *Food Estate, Menakar Politik Pangan Indonesia Kajian Atas Proyek Food Estate Kalimantan Tengah* (Palangkaraya, 2021).

<sup>37</sup> Travis, "Discovering the Fault Lines in American Civil–Military Relations."

Dari konsep tersebut, dapat diterima bahwa pemerintah Indonesia memobilisasi Kementerian Pertahanan, TNI dan Komcad, BCLSN, serta PT. Agrinas dalam proyek *Food Estate* sebagai wujud pluralistik aktor. Militer sendiri merupakan aktor utama dalam urusan pertahanan dan keamanan negara. Realitasnya di Papua, menunjukkan pola yang sebaliknya.

Kebijakan Food Estate ditetapkan secara sentralistik melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 dan Permen LHK Nomor P.24/2020 tanpa melibatkan pemerintah daerah maupun otoritas otonomi khusus Papua.<sup>38</sup> Dominasi pemerintah pusat ini mengingkari prinsip pluralisme yang seharusnya memberi ruang bagi masyarakat adat, lembaga lokal, dan otoritas daerah untuk turut menentukan arah kebijakan pembangunan. Akibatnya, kebijakan ini tidak hanya kehilangan legitimasi sosial, tetapi juga memperkuat dominasi militer atas ruang hidup warga sipil, sebuah bentuk kegagalan dalam menerapkan kontrol sipil yang pluralistik dan demokratis.

Selanjutnya, nilai partisipatif menurut Travis menjadi inti dari kontrol sipil pragmatis karena memastikan adanya komunikasi dua arah antara penguasa dan warga negara dalam setiap proses pengambilan keputusan publik.<sup>39</sup> Dalam konteks Papua, absennya partisipasi publik terlihat jelas. WALHI menemukan bahwa orang asli Papua sama sekali tidak dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program Food Estate, bahkan ketika kebijakan tersebut menyangkut tanah, hutan, dan sumber kehidupan mereka.

Tidak ada mekanisme konsultasi publik, tidak ada pengakuan atas hak ulayat, bahkan keberadaan masyarakat hanya diakui sejauh mereka dianggap kompatibel dengan proyek nasional.<sup>40</sup> Keputusan diambil sepenuhnya oleh kementerian dan korporasi besar tanpa mekanisme konsultasi dengan masyarakat hukum adat. Sedangkan, dalam perspektif pragmatisme Travis, kebijakan yang baik harus mampu membangun kepercayaan dan kolaborasi antara masyarakat dan negara. Ketika partisipasi publik dikesampingkan, maka kebijakan kehilangan legitimasi sosialnya dan berubah menjadi instrumen kekuasaan yang menindas, bukan mengayomi.

Terakhir, nilai provisional dalam pandangan Travis menggambarkan sifat kebijakan yang harus terbuka terhadap evaluasi dan perubahan. Travis menolak pendekatan absolutis dalam pemerintahan dan militerisme yang menganggap suatu kebijakan bersifat final. Sebaliknya, kebijakan yang pragmatis harus terus dievaluasi melalui pengalaman empiris dan refleksi sosial. Memobilisasi militer oleh pemerintah Indonesia dalam menjalankan proyek *Food Estate* dapat dibenarkan, meskipun hal tersebut bertentangan dengan reformasi TNI, tindakan tersebut menunjukkan sikap yang terbuka terhadap evaluasi dan perubahan mengingat proyek dijalankan demi mengatasi tantangan Covid-19.

Di sisi lain kebijakan *Food Estate* di Papua justru menunjukkan sikap kaku dan berulang. Pemerintah tidak belajar dari kegagalan proyek serupa sebelumnya seperti *Mega Rice Project* di Kalimantan dan Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di Malind, Merauke yang telah terbukti menimbulkan kerusakan ekologis, kehilangan hutan adat, dan penderitaan sosial bagi masyarakat.<sup>41</sup> Alih-alih merevisi pendekatan dan mengevaluasi dampak masa lalu, pemerintah malah mengulangi kebijakan dengan pola yang sama. Dalam kerangka Travis, hal ini menunjukkan hilangnya kemampuan negara untuk menyesuaikan dan memperbaiki kebijakan berdasarkan hasil empiris dan masukan sosial.

<sup>38</sup> Pusaka, *Keterlibatan Militer Dalam Proyek Food Estate: Berpotensi Melanggar HAM* (2021).

<sup>39</sup> Travis, "Decoding Morris Janowitz: Limited War and Pragmatic Doctrine."

<sup>40</sup> Walhi, *Kertas Posisi Food Estate Di Papua: Perampasan Ruang Berkedok Ketahanan Pangan ?* (2021).

<sup>41</sup> Takeshi Ito, Noer Fauzi Rachman, and Laksmi A. Savitri, "Power to Make Land Dispossession Acceptable: A Policy Discourse Analysis of the Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), Papua, Indonesia," *The Journal of Peasant Studies* 41, no. 1 (January 2014): 29–50, <https://doi.org/10.1080/03066150.2013.873029>.

Jika keempat nilai tersebut digunakan sebagai pisau analisis, maka tampak bahwa praktik pembangunan pangan di Indonesia masih gagal mencerminkan semangat reformasi hubungan sipil dan militer secara jelas, meskipun proyek Food Estate dapat dipahami menggunakan konsep kontrol sipil pragmatis dan memiliki keempat pilar utamanya. Dalam pendekatan teoritis dari Travis, ini merupakan bentuk deviasi struktural dari hubungan sipil-militer yang sehat. Pemerintah Jokowi masih mengedepankan kontrol administratif yang kaku dan sentralistik, alih-alih membangun hubungan sipil yang reflektif, terbuka, dan adaptif.

Dalam teori Travis, situasi ini menandakan bahwa negara belum memahami orientasi pragmatismenya dan terjebak dalam pola absolutisme kebijakan, yakni ketika kekuasaan negara dijalankan bukan untuk melayani masyarakat, melainkan mengarah pada dominasi politik dan ekonomi atas nama pembangunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah menerapkan kontrol sipil yang pragmatis, pemerintah belum benar-benar memahami makna sejati dari pragmatisme tersebut. Bahwa kontrol sipil pragmatis hanya sah sejauh hal tersebut digunakan untuk memperbaiki kehidupan nyata masyarakat, bukan untuk memperluas dominasi ekonomi dan militer atas nama pembangunan.

Pelibatan militer dalam *Food Estate* memiliki korelasi kuat dengan Doktrin Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), yang memandang ketahanan pangan sebagai bagian integral dari pertahanan negara non-militer. Dalam logika ini, pangan dipandang bukan sekadar komoditas ekonomi semata, melainkan sebagai logistik strategis yang harus dikelola dengan pendekatan teritorial dan komando pusat. Dalam kacamata teori Travis, korelasi ini justru menunjukkan adanya sekuritisasi pangan; di mana doktrin pertahanan digunakan untuk menjustifikasi peran dominan militer (seperti pengaktifan Komponen Cadangan dan keterlibatan Kemhan) yang justru berisiko mengabaikan prinsip kontrol sipil dan kedaulatan pangan lokal.

## **PENUTUP**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keterlibatan militer dalam program *Food Estate* merupakan manifestasi dari kontrol sipil pragmatis yang problematik. Penunjukan Kementerian Pertahanan sebagai pengelola utama cadangan logistik strategis menunjukkan bahwa pemerintah lebih memprioritaskan efisiensi rantai komando militer dan stabilitas nasional daripada penguatan birokrasi sipil dan pemberdayaan petani lokal.

Secara struktural memenuhi unsur adaptabilitas dalam menghadapi pandemi COVID-19, namun praktik ini menciptakan deviasi struktural dalam demokrasi Indonesia. Pemanfaatan militer dalam urusan sipil secara perlahan mengikis batas-batas reformasi 1998, menggeser logika pembangunan menuju logika pertahanan, dan berpotensi menghidupkan kembali peran ganda militer dalam wajah baru. Efektivitas jangka pendek yang ditawarkan oleh militerisasi agrikultur ini mengandung risiko jangka panjang bagi kualitas demokrasi Indonesia.

Pragmatisme dalam kontrol sipil seharusnya hanya sah jika digunakan untuk memperbaiki kehidupan nyata masyarakat melalui kebijakan berbasis bukti, bukan untuk memperluas dominasi politik dan ekonomi elit di atas ruang hidup warga sipil. Diperlukan evaluasi menyeluruh dan penguatan kembali supremasi sipil untuk memastikan bahwa ketahanan pangan nasional tidak dicapai dengan mengorbankan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

## **Ucapan Terima Kasih**

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian, Inovasi dan Pengabdian Masyarakat (LPIPM) Universitas Al Azhar Indonesia atas dukungan yang diberikan melalui Program Hibah Penelitian Internal Tahun Anggaran 2024.

## **Daftar Pustaka**

- Akbar, Akbar, Rahim Darma, Andi Irawan, Mahyuddin, Feryanto Feryanto, and Rida Akzar. "COVID-19 Pandemic and Food Security: Strategic Agricultural Budget Allocation in Indonesia." *Journal of Agriculture and Food Research* 18 (December 2024). <https://doi.org/10.1016/j.jafr.2024.101494>.
- Arif, Sirojuddin, Widjajanti Isdijoso, Akhmad Ramadhan Fatah, and Ana Rosidha Tamyis. *Tinjauan Strategis Ketahanan Pangan Dan Gizi Di Indonesia: Informasi Terkini 2019–2020*. Jakarta, 2020.
- Freedom House. "Indonesia : Freedom in the World 2023 Marking 50 Years in the Struggle for Democracy." *Freedom In The World* 2023, March 2023. <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2023>.
- Hara, Abubakar Eby, Agus Trihartono, and Suyani Indriastuti. *Keamanan Insani (Human Security): Eksplorasi Berbagai Perspektif Di Dunia*. Bantul: Pandiva, 2023.
- Haripin, Muhamad, Adhi Priamarizki, and Leonard C Sebastian. *Military Modernisation and Civil-Military Relations in Indonesia*. n.d.
- Ito, Takeshi, Noer Fauzi Rachman, and Laksmi A. Savitri. "Power to Make Land Dispossession Acceptable: A Policy Discourse Analysis of the Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), Papua, Indonesia." *The Journal of Peasant Studies* 41, no. 1 (January 2014): 29–50. <https://doi.org/10.1080/03066150.2013.873029>.
- Kamim, Anggalih Bayu Muh. *Kawula Tani Di Bawah Sepatu Lars: Militer Dalam Program Upsus Pajale Tahun 2015-2017 Di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta*. 1 (2019). Kristal, Damar. "PERBANDINGAN (DE)KONSOLIDASI DEMOKRASI: STUDI PENURUNAN KUALITAS DEMOKRASI DI INDONESIA DAN FILIPINA PADA PERIODE 2016-2020." *Jurnal Penelitian Politik* 18, no. 2 (November 2021): 122–40.
- McDonnell, John E. "The Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE): An Ecologically Induced Genocide of the Malind Anim." *Journal of Genocide Research* 23, no. 2 (2021): 257–78. <https://doi.org/10.1080/14623528.2020.1799593>.
- McNabb, David E. *Research Methods for Political Science Quantitative, Qualitative and Mixed Method Approaches*. Routledge, 2020.
- Pusaka. *FOOD ESTATE PAPUA, Mengancam Kualitas Hidup Rakyat Papua Dan Lingkungan Hidup*. Papua, 2021.
- . *Keterlibatan Militer Dalam Proyek Food Estate: Berpotensi Melanggar HAM*. 2021.
- . *Keterlibatan Militer Dalam Proyek Food Estate: Berpotensi Melanggar HAM*. 2021.
- Raharjo Jati, Wasisto. "The Impact of Ongoing Pandemic COVID-19 on Indonesia Democracy: Democratic Breakdown, Political Inequality, and Deepening Clientilism." *Jurnal Penelitian Politik*, 19, no. 1 (June 2022).

- Risnanda, Arsita Wahyu, Teguh Soedarto, and Fatchur Rozci. "KETAHANAN PANGAN DI TENGAH KETERGANTUNGAN IMPOR BERAS: ANALISIS TREN DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA." *Forum Agribisnis* 15, no. 2 (September 2025): 346–60. <https://doi.org/10.29244/fagb.15.2.346-360>.
- Rudiawan, Beni, Amarulla Octavian, Rizerius Eko Hadi Sancoko, Wayan Nuriada, Buddy Suseto, Martinus Dwi Arjanto Widodo, and Endah Sri Rejeki. "Building an Integrated Food Estate to Realize Territorial Resilience in Papua." *Open Access Indonesia Journal of Social Sciences* 4, no. 2 (June 2021): 360–69. <https://doi.org/10.37275/oaijs.v4i2.60>.
- Savitri, Laksmi Adriani, Natasha Devanand Dhanwani, and Sutami Amin. "Biopolitik Food Estate Dan Kerusakan Metabolik Alam-Manusia Papua." *FLAN Indonesia Dan PUSAKA*, 2023, 1–49.
- Setijadi, Charlotte. "The Pandemic as Political Opportunity: Jokowi's Indonesia in the Time of Covid-19." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 57, no. 3 (2021): 297–320. <https://doi.org/10.1080/00074918.2021.2004342>.
- Sukmawan, Denny Indra, and Rodon Pedrasan. "Kontrol Sipil Pragmatis: Implementasi Hubungan Sipil-Militer Di Masa Pemerintahan Joko Widodo." *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 13, no. 2 (October 2022): 274–89. <https://doi.org/10.14710/politika.13.2.2022.274-289>.
- Travis, Donald S. "Decoding Morris Janowitz: Limited War and Pragmatic Doctrine." *Armed Forces and Society* 46, no. 1 (January 2020): 68–91. <https://doi.org/10.1177/0095327X18760272>.
- . "Discovering the Fault Lines in American Civil–Military Relations." *Armed Forces and Society* 44, no. 4 (October 2018): 731–47. <https://doi.org/10.1177/0095327X17728351>.
- Travis, Donald S. "Pursuing Civilian Control Over the Military." *Armed Forces & Society* 45, no. 3 (2019): 546–60. <https://doi.org/10.1177/0095327X18781539>.
- . "Saving Samuel Huntington and the Need for Pragmatic Civil–Military Relations." *Armed Forces & Society* 43, no. 3 (2017): 395–414.
- Walhi. *Kertas Posisi Food Estate Di Papua: Perampasan Ruang Berkedok Ketahanan Pangan ?* 2021.
- WALHI. *Tinjauan Lingkungan Hidup 2021 : Negara Gagal Atas Krisis ?* 2021.
- Walhi Kalimantan Tengah. *Food Estate, Menakar Politik Pangan Indonesia Kajian Atas Proyek Food Estate Kalimantan Tengah*. Palangkaraya, 2021.
- Williams, Paul D., and Matt McDonald. *Security Studies An Introduction*. 4th ed. Edited by Paul D. Williams and Matt McDonald. Routledge, 2023.
- Wisnu, Ditta. "Food Estate Program Law Politics." *Journal of Contemporary Sociological Issues* 2, no. 1 (2022): 76. <https://doi.org/10.19184/csi.v2i1.28051>.

- Akbar, Akbar, Rahim Darma, Andi Irawan, Mahyuddin, Feryanto Feryanto, and Rida Akzar. 'COVID-19 Pandemic and Food Security: Strategic Agricultural Budget Allocation in Indonesia'. *Journal of Agriculture and Food Research* 18 (1 December 2024). <https://doi.org/10.1016/j.jafr.2024.101494>.
- Arif, Sirojuddin, Widjajanti Isdijoso, Akhmad Ramadhan Fatah, and Ana Rosidha Tamyis. 'Tinjauan Strategis Ketahanan Pangan Dan Gizi Di Indonesia: Informasi Terkini 2019–2020'. Jakarta, August 2020.
- Freedom House. 'Indonesia : Freedom in the World 2023 Marking 50 Years in the Struggle for Democracy'. Freedom In The World 2023, March 2023. <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2023>.
- Hara, Abubakar Eby, Agus Trihartono, and Suyani Indriastuti. *Keamanan Insani (Human Security): Eksplorasi Berbagai Perspektif Di Dunia*. Bantul: Pandiva, 2023. <https://penerbitpandiva.com/buku-keamanan-insani-human-security-eksplorasi-berbagai-perspektif-di-dunia-3>.
- Haripin, Muhamad, Adhi Priamarizki, and Leonard C Sebastian. *Military Modernisation and Civil-Military Relations in Indonesia*, n.d.
- Ito, Takeshi, Noer Fauzi Rachman, and Laksmi A. Savitri. 'Power to Make Land Dispossession Acceptable: A Policy Discourse Analysis of the Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), Papua, Indonesia'. *The Journal of Peasant Studies* 41, no. 1 (2 January 2014): 29–50. <https://doi.org/10.1080/03066150.2013.873029>.
- Kamim, Anggalih Bayu Muh. 'Kawula Tani Di Bawah Sepatu Lars: Militer Dalam Program Upsus Pajale Tahun 2015-2017 Di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta' 1 (2019).
- Kristal, Damar. 'PERBANDINGAN (DE)KONSOLIDASI DEMOKRASI: STUDI PENURUNAN KUALITAS DEMOKRASI DI INDONESIA DAN FILIPINA PADA PERIODE 2016-2020'. *Jurnal Penelitian Politik* 18, no. 2 (22 November 2021): 122–40. <https://ejournal.politik.lipi.go.id/>.
- McDonnell, John E. 'The Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE): An Ecologically Induced Genocide of the Malind Anim'. *Journal of Genocide Research* 23, no. 2 (2021): 257–78. <https://doi.org/10.1080/14623528.2020.1799593>.
- McNabb, David E. *Research Methods for Political Science Quantitative, Qualitative and Mixed Method Approaches*. Routledge, 2020.
- Pusaka. 'FOOD ESTATE PAPUA, Mengancam Kualitas Hidup Rakyat Papua Dan Lingkungan Hidup'. Papua, 2021. [www.pusaka.or.id](http://www.pusaka.or.id).
- . 'Keterlibatan Militer Dalam Proyek Food Estate: Berpotensi Melanggar HAM', 13 October 2021. <https://www.kemhan.go.id/2021/03/10/kemhan-terus-wujudkan-cadangan-logistik-strategis->.
- . 'Keterlibatan Militer Dalam Proyek Food Estate: Berpotensi Melanggar HAM', 13 October 2021.
- Raharjo Jati, Wasisto. 'The Impact of Ongoing Pandemic COVID-19 on Indonesia Democracy: Wildan Faisol, Heri Herdiawanto, Ashabriel Nadiva Candialmeera, Nobel Jihadine

- Democratic Breakdown, Political Inequality, and Deepening Clientelism'. *Jurnal Penelitian Politik*, 19, no. 1 (22 June 2022). <https://ejournal.politik.lipi.go.id/>.
- Risnanda, Arsita Wahyu, Teguh Soedarto, and Fatchur Rozci. 'KETAHANAN PANGAN DI TENGAH KETERGANTUNGAN IMPOR BERAS: ANALISIS TREND DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA'. *Forum Agribisnis* 15, no. 2 (29 September 2025): 346–60. <https://doi.org/10.29244/fagb.15.2.346-360>.
- Rudiawan, Beni, Amarulla Octavian, Rizerius Eko Hadi Sancoko, Wayan Nuriada, Buddy Suseto, Martinus Dwi Arjanto Widodo, and Endah Sri Rejeki. 'Building an Integrated Food Estate to Realize Territorial Resilience in Papua'. *Open Access Indonesia Journal of Social Sciences* 4, no. 2 (16 June 2021): 360–69. <https://doi.org/10.37275/oaijs.v4i2.60>.
- Savitri, Laksmi Adriani, Natasha Devanand Dhanwani, and Sutami Amin. 'Biopolitik Food Estate Dan Kerusakan Metabolik Alam-Manusia Papua'. *FLAN Indonesia Dan PUSAKA*, 2023, 1–49.
- Setijadi, Charlotte. 'The Pandemic as Political Opportunity: Jokowi's Indonesia in the Time of Covid-19'. *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 57, no. 3 (2021): 297–320. <https://doi.org/10.1080/00074918.2021.2004342>.
- Sukmawan, Denny Indra, and Rodon Pedrasan. 'Kontrol Sipil Pragmatis: Implementasi Hubungan Sipil-Militer Di Masa Pemerintahan Joko Widodo'. *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 13, no. 2 (31 October 2022): 274–89. <https://doi.org/10.14710/politika.13.2.2022.274-289>.
- Travis, Donald S. 'Decoding Morris Janowitz: Limited War and Pragmatic Doctrine'. *Armed Forces and Society* 46, no. 1 (1 January 2020): 68–91. <https://doi.org/10.1177/0095327X18760272>.
- . 'Discovering the Fault Lines in American Civil–Military Relations'. *Armed Forces and Society* 44, no. 4 (1 October 2018): 731–47. <https://doi.org/10.1177/0095327X17728351>.
- Travis, Donald S. 'Pursuing Civilian Control Over the Military'. *Armed Forces & Society* 45, no. 3 (2019): 546–60. <https://doi.org/10.1177/0095327X18781539>.
- . 'Saving Samuel Huntington and the Need for Pragmatic Civil–Military Relations'. *Armed Forces & Society* 43, no. 3 (2017): 395–414. <https://www.jstor.org/stable/48609209>.
- Walhi. 'Kertas Posisi Food Estate Di Papua: Perampasan Ruang Berkedok Ketahanan Pangan?', 2021. <https://foodestate.pantaugambut.id/>.
- WALHI. 'Tinjauan Lingkungan Hidup 2021 : Negara Gagal Atas Krisis?', 2021. [https://www.walhi.or.id/uploads/buku/TLH\\_2021\\_edited\\_2.pdf](https://www.walhi.or.id/uploads/buku/TLH_2021_edited_2.pdf).
- Walhi Kalimantan Tengah. 'Food Estate, Menakar Politik Pangan Indonesia Kajian Atas Proyek Food Estate Kalimantan Tengah'. Palangkaraya, March 2021.
- Williams, Paul D., and Matt McDonald. *Security Studies An Introduction*. Edited by Paul D. Williams and Matt McDonald. 4th ed. Routledge, 2023.
- Wisnu, Ditta. 'Food Estate Program Law Politics'. *Journal of Contemporary Sociological Issues* 2, no. 1 (2022): 76. <https://doi.org/10.19184/csi.v2i1.28051>.

